

PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG

Edi Wibowo¹, Titin Maidarti², Inti Nuswandari³

^{1,2,3} Universitas IPWIJA, Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia

*Email untuk Korespondensi: 78.ediw@gmail.com, titin2meidarti@gmail.com, inti_endratmo@yahoo.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Good Governance,
Kompetensi Sumber
Daya Manusia,
Kualitas Pengelolaan
Administrasi Kata

Keywords:

Good Governance,
Human Resource
Competence,
Quality of
Administrative
Management

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk menganalisis pengaruh dari penerapan good governance, dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap kualitas pengelolaan administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Metode yang dipakai adalah kuantitatif dengan menggunakan asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah 93 orang pegawai Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan, dan menggunakan teknik total sampling, sampel penelitian ini adalah 93 sampel. Analisis data dengan melakukan uji Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi. Terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi.

The purpose of this study is to analyze the effect of the implementation of good governance and human resource competence on the quality of the management of the State Finance and Property Administration of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The method used is quantitative using associative. The population in this study were 93 employees of the Ministry of Health's Finance and State Property Bureau, and using a total sampling technique, the research sample was 93 samples. Data analysis performed Multiple Linear Regression test. The results of the study that there is influence of Good Governance on the Quality of Administrative Management. There is influence of Human Resource Competence on the Quality of Administrative Management.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi masih menjadi masalah di Indonesia yang membutuhkan perhatian dan solusi yang luas. Secara kualitatif, dengan mudah dapat ditunjukkan di mana-mana bahwa tuntutan yang berbeda terhadap pelayanan publik dilihat sebagai tanda dari ketidakpuasan masyarakat sehari-hari. Harus diakui, dalam pelayanan publik yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat terus diperbarui seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perubahan dalam pemerintahan, baik dari segi paradigma maupun bentuk pelayanannya (A. A. A. P. Mangkunegara, 2011).

Tertib administrasi merupakan konsep dari pengembangan pelayanan bagi penyelenggara bidang administrasi agar pelayanan administrasi menjadi lebih efisien dan efektif. Selama ini, pelayanan administrasi publik terkesan lambat dan tidak efisien karena kurangnya koordinasi dan desentralisasi tugas yang jelas. Pelayanan dinilai baik adalah pelayanan yang hasilnya sesuai dengan harapan. Orang akan menyampaikan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang efisien serta efektif. Masalah yang timbul dalam pelayanan dan disebabkan oleh individu/agen layanan dan yang dilayani, contohnya komunikasi yang tidak jelas. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang diberikan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zamzami & Gowon, 2021).

Pelayanan administrasi masyarakat merupakan tanggung jawab dari pemerintah (baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah), untuk menyelenggarakan kegiatan berbasis kepentingan umum atau sosial. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik akan terpenuhi hanya apabila pegawai memberikan apa yang diharapkan selama ini, pelayanan ini memiliki tiga unsur utama yaitu biaya relatif murah, jam kerja yang relatif juga cepat dan kualitasnya relatif yang baik (Barus et al., n.d.).

Kualitas kerja Pelaporan Keuangan Kegiatan dan pelaporan informasi keuangan harus memenuhi juga kebutuhan pengguna, sedangkan 'karakteristik kualitatif dari informasi data keuangan harus cukup dan pengungkapan yang adil berdasarkan keamanan orang pemilik (Yadiati, 2017). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 No. 01 tentang Standar Akuntansi Negara bahwa laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif. Empat karakteristik berikut merupakan asumsi normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu: relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan mudah dipahami (Tullah et al., 2018).

Berikut ini merupakan Matriks tabel sandingan indikator kinerja kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dilakukan sebelum serta sesudah penyesuaian (Masitoh et al., 2020).

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dilakukan sebelum dan sesudah penyesuaian

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase ketepatan waktu penyampaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satuan Kerja	100%	100%	100%
2	Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	95%	71%	75%
3	Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80	60%	90%	150%
4	Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	100%	36%	36%

Terlihat dari data di atas, beberapa indikator mengalami penurunan, dan masih digunakannya pembukuan dalam pengelolaan keuangan, sehingga pencarian data menjadi lama. Penyajian kembali pengelolaan keuangan membutuhkan waktu yang lama karena masih tercatat dalam buku besar sehingga mengakibatkan proses penyajian kembali tidak terorganisasi dengan baik. Kesulitan mengumpulkan data keuangan yang disimpan dalam buku yang berbeda (Siahaya et al., 2018).

Transaksi tatap muka terbatas, sehingga pencarian dokumen/koreksi yang mewakili data-data dan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan menghadirkan sejumlah hambatan pengungkapan ketidaksesuaian. Masih terdapat permasalahan kualitas penyajian data di LK yang terkait dengan e-Rekon&LK, seperti kesalahan penggunaan rekening pada saat perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai aturan merupakan cita-cita juga harapan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dari good governance di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1. Peraturan No. 32, tahun 2004 tentang pelaksanaan peraturan daerah sendiri. Menginformasikan kepada publik tentang kinerja aparat pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk cara mengurangi asimetri informasi di-sektor publik. Menurut Robinson (Nur et al., 2016), mengukur kepentingan sektor publik mencakup tiga ukuran, yaitu: a). Sebagai fasilitas tempat pembelajaran yang ditingkatkan layanannya, b). sebagai pembelajaran untuk meningkatkan praktik manajemen, serta c). Sebagai media pelaporan akuntabilitas juga transparansi.

Pemerintahan yang dinilai baik secara konseptual, mempunyai pengertian dari kata baik atau good dalam istilah ke-pemerintahan baik yang juga memiliki makna bahwa good governance berarti mengandung dua pemahaman: Kesatu, nilai yang menjunjung tinggi kemauan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang bisa meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional bagi kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, dari aspek fungsional pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya demi mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2017).

Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam (Sari, 2021) "Good Government Governance yaitu: menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid, dan bertanggung-jawab, efisien dan juga efektif, dengan menjaga factor kesinergisan interaksi yang konstruktif antara domain-domain negara, sektor swasta dan juga masyarakat."

Selain itu, laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan oleh ilmu akuntansi sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkompoten untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut.

Menurut Spencer (dalam Zai, 2020), kompetensi merupakan dasar dari karakteristik pribadi yang berkaitan dengan hasil yang dicapai di tempat kerja. Menurut Werther dan Davis (Sutrisno, 2017), sumber daya manusia adalah karyawan yang siap, pandai, dan cermat untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Menurut (A. Mangkunegara & Anwar, 2012), kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sifat kepribadian yang mempengaruhi kinerjanya secara langsung.

Kinerja pegawai Kementerian Keuangan dan Biro Barang Milik Negara merupakan salah satu komponen aparatur negara yang masih kurang optimal. Hal ini terungkap dengan adanya pegawai yang tidak memenuhi kriteria analisis jabatan. Hambatan bagi karyawan adalah kurangnya kemandirian, kepercayaan diri dan motivasi diri, serta seringkali tidak mampu melepaskan pola pikir terstruktur, yaitu melakukan aktivitas berdasarkan instruksi dari atasan atau uraian tugas yang terstruktur. Karena kreativitas sangat menentukan pemikiran dan gagasan yang dikembangkan karyawan untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, peneliti tertarik memilih judul ini. Dan berdasarkan uraian diatas, peneliti berkeinginan untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Good governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe asosiatif kuantitatif. Menurut (Silalahi & Atif, 2015), penelitian kuantitatif adalah studi ilmiah sistematis tentang hal kausalitas bagian-bagian yang sistematis dan fenomena beserta hubungannya. Penelitian kuantitatif ini tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model matematika, teori dan atau hipotesis yang dapat berkaitan dengan fenomena alam. Sedangkan menurut (Sujarweni, 2015), “metode asosiatif yaitu suatu penelitian yang tujuannya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”.

VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL

Tabel 2. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Pernyataan Kuersioner	Sumber
<p>Good Governance (X₁)</p> <p>Menurut Jubaedah (2007) tujuan dari <i>Good Governance</i> adalah agar sebuah instansi mampu menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, kegiatan yang transparan dan terjaganya keseimbangan antara upaya pencapaian tujuan ekonomi, dengan tujuan sosial-ekonomi instansi itu sendiri.</p>	<p>➤ Transparansi</p>	1. Instansi dimana saya bekerja sudah menyelenggarakan <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik)	Mardiasmo (2009:18)
		2. Adanya prinsip keterbukaan pemerintah akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik	
		3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi sudah dipublikasikan secara bebas, dapat diakses masyarakat luas	
		4. Informasi yang tersedia dapat dipahami merupakan bentuk perwujudan nyata dari transparansi pemerintah	
	<p>➤ Akuntabilitas</p>	5. Pertanggung-jawaban instansi pemerintahan dilaksanakan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	
		6. Saya berperan serta dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di setiap akhir tahun anggaran	
		7. Mekanisme dari sistem akuntabilitas belum diimplementasikan menyeluruh pada instansi tempat saya bekerja	
		8. Pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik akan setiap aktivitas membangun <i>good governance</i>	
	<p>➤ Value for Money</p>	9. Kinerja instansi dimana saya bekerja tidak berdasarkan prinsip keefektifan	
		10. Kinerja instansi dimana saya bekerja sudah menggunakan prinsip efisiensi	
		11. Saya memahami pengelolaan sumber daya publik mampu dilakukan secara ekonomis agar menciptakan <i>good governance</i>	
		12. Demi menciptakan <i>good governance</i> , pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara efektif	
<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂)</p> <p>Menurut Ihsanti (2014), Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu kemampuan dari seseorang atau individu dalam suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi tugas atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya baik secara efektif dan efisien.</p>	<p>➤ Pengetahuan</p>	1. Saya paham tugas, pokok, fungsi dan uraian tugas dalam penyusunan laporan keuangan dengan baik	Hutapea dan Thoha (2008:8)
		2. Saya memiliki pemahaman teknis tugas yang dilakukan dengan baik	
		3. Saya sering membaca literatur dan referensi berupa buku, paper pengetahuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan saya	
		4. Saya memahami perihal Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dengan baik dan benar	
	<p>➤ Keterampilan</p>	5. Saya sanggup menyusun dan menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan baik dan benar	
		6. Saya mempunyai keterampilan yang baik dalam bidang pekerjaan / tugas saya	
		7. Saya sangat mampu bersikap terampil dan bisa diandalkan	
		8. Saya mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan tepat waktu	

	➤ Sikap	<p>9. Saya rutin mengikuti pelatihan terkait bidang saya</p> <p>10. Saya selalu memberikan keteladanan bersikap dan bertingkah laku kepada bawahan saya</p> <p>11. Saya tertarik dengan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tanggungjawab saya</p> <p>12. Saya selalu bekerja yang berdasarkan praktek yang dapat diterima secara umum</p>	
<p>Kualitas Pengelolaan Administrasi (Y)</p> <p>Kualitas Pengelolaan Administrasi adalah pemahaman pelanggan tentang kegiatan kearsipan yang dilakukan secara profesional</p>	➤ Relevan	<p>1. Informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi dimana tempat saya bekerja dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dimasa lalu</p> <p>2. Laporan keuangan dapat disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan</p> <p>3. Informasi didalam laporan keuangan yang saya buat bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang</p> <p>4. Informasi dalam laporan keuangan saya buat secara lengkap yang mencakup semua informasi data akuntansi dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan</p>	Rahmadani (2015)
	➤ Andal	5. Informasi yang didapat dari laporan keuangan yang saya buat mampu menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya, yang harus disajikan dalam laporan keuangan	
		6. Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan saya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat materiil	
		7. Informasi yang saya uraikan dalam laporan keuangan, teruji kebenarannya	
		8. Informasi yang dihasilkan pada laporan keuangan saya buat tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu	
	➤ Dapat dibandingkan dan dipahami	9. Informasi yang termuat pada laporan keuangan yang saya susun bisa dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya	
		10. Saya selalu berusaha menggunakan kebijakan akuntansi yang sama setiap tahunnya	
		11. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan yang saya susun sudah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna	
		12. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang saya buat, disajikan dalam format serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	

Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu: 93 pegawai Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan RI.

Pengambilan teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *total sampling*. Dengan menggunakan teknik *total sampling*, ditentukan 93 orang pegawai Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara

Kementerian Kesehatan RI. Alasan menggunakan *total sampling* adalah berdasarkan jumlah populasi yang kurang dari 100, maka besar sampel penelitian ini adalah 93 orang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah dengan metode yang menggunakan analisis eksploratif. Penulis menggunakan aplikasi SPSS v.20 untuk analisis data. Sebuah statistik uji yang digunakan:

1. Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk memprediksi bagaimana variabel dependen (Kualitas Pengelolaan Administrasi) dipengaruhi oleh variabel independen (*Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia). Rumus persamaan untuk regresi linier berganda ini adalah:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

2. Uji Hipotesis

a) Uji t

Uji t digunakan untuk menilai apakah model variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan dilakukan uji t berganda. Sugiyono (2013:57) Kriteria tujuan:

1) H_0 diterima, jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (tidak berpengaruh) dan jika nilai $sig > 0,05$ (tidak signifikan).

2) H_0 ditolak, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ (berpengaruh), dan jika nilai $sig \leq 0,05$ (signifikan).

3. Uji Kelayakan Model

Pengujian ini dilakukan dengan mengamati berapa nilai signifikansi F pada taraf yang digunakan (dalam penelitian ini menggunakan taraf 5%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Karakteristik Responden

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin		
Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	38	40.86
Perempuan	55	59.14
Jumlah	93	100
Karakteristik Responden berdasarkan Lama Bekerja		
Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
< 3 Tahun	3	3.23
3 - 6 Tahun	66	70.97
> 6 Tahun	24	25.81
Jumlah	93	100

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2022

Berdasarkan data tersebut, terdapat total 38 pegawai laki-laki atau 40.86%, dan perempuan sebanyak 55 pegawai atau 59.14%. Dapat dikatakan bahwa pada Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan RI rata-rata pegawai didominasi oleh Perempuan.

Tabel 4. Hasil Analisis Output SPSS

Uji Hipotesis	t hitung	t table	Ket
Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi	4.718	1.985	Berpengaruh
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi	5.461	1.985	Berpengaruh
Uji Model	f hitung	f tabel	Ket
Uji F	320.209	2.70	Berpengaruh
Uji Model	R Square	Persentase	Ket
Uji Koefisien Determinasi	0,877	87.7%	Berpengaruh

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2022

Uji t

Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi

Hasil uji t diketahui, variabel Good Governance (X1) memiliki nilai t numerik sebesar 4.718 dan nilai tabel sebesar 1.985 untuk $n = 93$. Jadi $4.718 > 1.985$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat dinyatakan bahwa: Good Governance memiliki pengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) tidak signifikan sebesar 5.461, dan nilai tabel $n=65$ adalah 1.985, jadi $5.461 > 1.985$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat dikatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi.

Uji Model

Dari hasil statistik diatas, yaitu: uji ANOVA dapat diperoleh nilai F-hitung sebesar 320.209, sedangkan F-tabel (0,05) dengan $N=93$ sebesar 2.70. Jadi F-hitung $>$ dari F-tabel (0,05) atau $320.209 > 2.70$, maka dapat dikatakan bahwa Good Governance (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi (Y) secara bersamaan. Menurut tabel diatas, mengembangkan model gabungan dengan nilai R-kuadrat 0,877 berarti bahwa Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi 87.7% Kualitas Pengelolaan Administrasi, sedangkan 12.3% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak dipelajari oleh studi penulis ini.

Pembahasan

Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasanya Good Government Governance berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi. Hal ini dikarenakan organisasi menerapkan 5 prinsip yang dalam menjalankan good governance yaitu: demokrasi, transparan, akuntabilitas, budaya hukum, serta terdapat kewajaran dan kesetaraan. Pedoman ini menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan good government governance agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik, juga kualitas pengelolaan administrasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan program agenda Manajemen Publik Baru diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifitasan serta efisiensi pelayanan dan organisasi pelayanan publik dengan sudut pandang atau nilai-nilai yang mengedepankan akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kurniasih et al., 2013; Rachmawati et al., 2015) menyatakan bahwa good governance memiliki peran untuk mewujudkan informasi data keuangan yang baik dan berkualitas.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh atas Kualitas Pengelolaan Administrasi. Hal ini dikarenakan kompetensi yang dimiliki pegawai sudah baik, dan

telah memiliki kemampuan berpikir yang bisa mendukung dalam penyelesaian setiap tugas-tugasnya dengan baik, sehingga kualitas pengelolaan administrasi dapat berjalan dengan baik.

Kemampuan sumber daya manusia adalah bentuk deskripsi karakteristik ilmu pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang dimiliki orang untuk melakukan pekerjaan atau peran tertentu secara efektif. Kompetensi dan kualitas seorang PNS mengacu pada pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Oleh karena itu, kapabilitas sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai kapabilitas seorang PNS yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang secara langsung mempengaruhi kinerjanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini sesuai dengan apa yang ditemukan Rima Apriliani, Salasiah, Diana (2021) 'Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan, serta secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisa dan pembahasan diatas, Good Governance berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi. Hal ini merupakan bentuk prinsip akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat adalah pembuatan Laporan keuangan pemerintah yang merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan prinsip good governance. Tuntutan masyarakat luas yang besar terhadap proses akuntabilitas pemerintah, mengeluarkan implikasi bagi pemerintah untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat, dan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi tersebut. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Administrasi. Dalam hal ini seorang Pegawai Negeri Sipil harus memiliki kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, skill/keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, sehingga seorang PNS mampu melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien dan profesional.

REFERENSI

- Barus, G., Sirait, N., & Sukarja, D. (n.d.). Penerapan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Hukum Acara Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)(Studi Kasus Yamaha Dan Honda Putusan Kppu Perkara Nomor. 04/KPPU-I/2016). *TRANSPARENCY*, 2(1).
- Kurniasih, T., Sari, R., & Maria, M. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 44276.
- Mangkunegara, A. A. P. (2011). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*.
- Mangkunegara, A., & Anwar, P. (2012). *Evaluasi kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama. Masrokah.
- Masitoh, S., Tullah, D. S., & Apriyanti, E. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). *Jurnal Ekonomi STIEP*, 5(2), 18–26.
- Nur, M., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Manajemen sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada sdn dayah guci kabupaten pidie. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1).
- Rachmawati, Y., Susanto, D., & Yusuf, D. A. (2015). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta*, 12(02), 116060.
- Sari, P. D. (2021). *Memperkokuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Sedarmayanti, P. (2017). Pengembangan sumber daya manusia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siahaya, E., Asnawi, M., & Allo Layuk, P. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 3(1), 276645.
- Silalahi, U., & Atif, N. F. (2015). *Metode penelitian sosial kuantitatif*. Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*.
- Sutrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ke-9*. Jakarta: Kencana.
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance (Ggg) Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat Dan Banten). *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1).
- Zamzami, Z., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening:(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(3), 136–148.